

**PEMBERDAYAAN ANAK BERBASIS PENDIDIKAN NONFORMAL  
MELALUI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA)  
DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nurul Iqlima  
NPP. 31.0756

*Asdaf Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [iqlimanrl@gmail.com](mailto:iqlimanrl@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Child Friendly City Program (KLA) is a program developed by the central government and implemented together with regional governments in order to create a quality generation. The Child Friendly City Program aims to fulfill children's rights so that they can grow and develop well in their environment and receive a decent education. The high school dropout rate in Bima City is still a problem that the government must overcome. **Purpose:** Therefore, the Bima City government is implementing the Child Friendly City Program (KLA) to support the education of children who have dropped out of school. This is done by providing non-formal education through the Learning Activity Studio. This research aims to determine and analyze children's empowerment based on non-formal education through Child Friendly Cities (KLA) in Bima City, West Nusa Tenggara Province. **Method:** Researchers used descriptive qualitative research methods as a reference in compiling this research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique begins with data reduction, then continues with data presentation and drawing conclusions. The theory used is the empowerment theory from Cook and Macaulay with one variable, namely empowerment. **Result:** The results of the research show that the Child Friendly City Program has a positive impact, as seen from the child-friendly facilities and infrastructure, then the formation of the Children's Forum, and the Learning Activities Studio as facilitators for non-formal education. **Conclusion:** here are still obstacles in implementing the program, such as children's psychological problems and low levels of public confidence.*

**Keywords:** *Empowerment, Child Friendly City Program, and Non-formal Education*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Program Kota Layak Anak (KLA) merupakan program yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan generasi yang berkualitas. Program Kota Layak Anak bertujuan untuk memenuhi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungannya serta mendapatkan pendidikan yang layak. Tingginya tingkat putus sekolah di Kota Bima masih menjadi permasalahan yang harus di atasi pemerintah. **Tujuan:** Oleh karena itu, pemerintah Kota Bima menerapkan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam menunjang pendidikan anak-anak yang telah putus sekolah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendidikan nonformal melalui Sanggar Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode:** Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan dari *Cook* dan *Macaulay* dengan satu variabel yaitu pemberdayaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kota Layak Anak memiliki dampak yang positif, terlihat dari sarana dan prasarana yang ramah bagi anak, kemudian pembentukan Forum Anak, dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai fasilitator pada pendidikan nonformal. **Kesimpulan:** Pada penerapan program masih terdapat kendala seperti permasalahan psikologis anak serta tingkat keyakinan masyarakat yang masih rendah. **Kata Kunci:** Pemberdayaan, Program Kota Layak Anak, dan Pendidikan Nonformal

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar anak yang berusia 10-17 tahun mengalami penurunan tingkat pembelajaran sebesar 70,31% dari tahun 2019. Tentunya covid-19 menjadi pembatas bagi anak untuk belajar secara tatap muka terutama bagi anak-anak yang tinggal dipedesaan. Bekerja juga merupakan kondisi yang sering dialami oleh sebagian besar anak-anak dengan kasus membantu orangtua untuk bekerja. Biasanya anak-anak tidak memiliki status yang tetap atau pekerja yang tidak diupah. Karena kondisi penurunan tingkat pembelajaran yang memprihatinkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB mencatat, pada semester 1 tahun 2021 terdapat sebanyak 2.021 siswa SMA/Sederajat yang terpaksa putus sekolah dengan berbagai alasan. Angka tingkat putus sekolah pada Kota Mataram sangat rendah, berbanding terbalik dengan Kota Bima yang menempati posisi kedua. Meskipun angka tingkat putus sekolah di Kota Bima tergolong rendah dibandingkan



dengan Kabupaten yang ada di Provinsi NTB, tetapi dengan status Kota Bima yang merupakan kawasan perkotaan seharusnya tidak terjadi ketimpangan angka putus sekolah antara Kota Bima dan Kota Mataram. Menghadapi permasalahan yang terjadi diperlukan sebuah upaya pemberdayaan bagi anak dengan rentang usia 10-17 tahun, hal ini bertujuan untuk membina serta mengatasi kemerosotan akan pendidikan terkhusus pendidikan formal yang seharusnya wajib didapatkan oleh anak. Upaya pemberdayaan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menciptakan program-program yang berfokus pada pendidikan formal maupun nonformal sebagai wujud pemenuhan akan 'Hak memperoleh pendidikan' pada Pasal 9 Ayat 1 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat". Oleh karena itu, untuk mengatasi tingginya tingkat putus sekolah, pemerintah pusat melahirkan sebuah program yang berfokus pada pengembangan mutu dan kualitas hidup yang layak bagi anak. Program Kota Layak Anak (KLA) merupakan program yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan generasi yang berkualitas. Dengan adanya program Kota Layak Anak serta permasalahan tingginya tingkat putus sekolah di Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima untuk menangani permasalahan putus sekolah di Kota Bima. Kemudian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima bersinergi bersama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk memberikan pendidikan yang berbasis nonformal kepada anak-anak yang telah putus sekolah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan anak dalam mendukung sektor pendidikan nonformal pada Program Kota Layak Anak. Faktor ekonomi adalah salah satunya. Faktor ekonomi keluarga yang sulit mengakibatkan banyak anak putus sekolah karena tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya baik dalam hal membayar biaya sekolah, membantu orangtua bekerja, atau menikah dini. Tentu saja semakin banyak kendala maka semakin besar pula angka putus sekolah di Kota Bima. Faktor berikutnya adalah kepercayaan diri atau kompetensi yang dimiliki oleh anak. Tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan keluarga maupun sosial. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi psikologis anak serta menurunkan rasa percaya diri dalam mengembangkan potensinya. (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2023)

Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Minimnya wawasan masyarakat terkait dengan kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah sehingga hal ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan atau program. Kemudian

sasaran sosialisasi yang kurang tepat dari pemerintah sehingga sebagian masyarakat merespon secara pasif.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dengan penelitian terdahulu baik dari segi pemberdayaan anak, pemberdayaan yang berpengaruh terhadap pendidikan nonformal, ataupun kebijakan-kebijakan tentang Kota Layak Anak. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Andi Ismail Lukman (2021) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan anak melalui Pendidikan nonformal pada PKBM Tiara Dezzy mencakup 3 tahapan yang menjadi patokan. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Supsiliani (2019) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan atau melalui pendidikan nonformal memiliki potensi yang cukup baik bagi kalangan menengah kebawah, baik itu kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan bisa untuk masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Sudut kajian konseptual melihat adanya kecocokan antara konsep pendidikan nonformal dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Karena dapat mengubah pola pikir masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya atau kesadaran mengubah hidupnya. Bahkan adanya indikasi manipulasi dari pemerintah untuk memenuhi persyaratan dari indikator keberhasilan dari kebijakan kota layak anak. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nistiarisa Agelina (2013) dengan judul Pemenuhan Kebutuhan Hak Pendidikan Formal Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak Pendidikan formal bagi anak berhadapan dengan hukum di Surakarta yang juga Tengah mengembangkan program kota layak anak masih terhalang oleh Beberapa permasalahan yang timbul seperti, lemahnya keutuhan keluarga, masyarakat yang kurang memahami penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum, perspektif *stakeholder* tentang hak anak bagi para anak berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen terlibat dalam penanganan ABH. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan program kota layak anak sehingga pendidikan tetap terlaksana dengan baik. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Dwiki Bayu Pamungkas (2023) dengan judul Kabupaten Layak Anak: Kebijakan Dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Cilacap dalam menangani kekerasan pada anak. pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten cilacap telah optimal dilakukan oleh pemerintah kabupaten cilacap, hal ini ditandai dengan penghargaan yang diterima oleh kabupaten cilacap. Namun, kebijakan dalam rangka menurunkan angka kekerasan pada anak belum optimal dilaksanakan. Hal ini karena faktor-faktor kejelasan kebijakan, informasi yang tersalurkan kepada masyarakat, dan juga staf atau anggota yang bertugas untuk menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian



kelima yang dilakukan oleh Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien (2022) dengan judul Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian tersebut membahas tentang peran yang dijalankan oleh dinas sosial Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kekerasan terhadap anak. Pada penelitian tersebut berisi bahwa dinas sosial memiliki keterbatasan terkait dengan sumber daya aparatur, fasilitas penunjang anak, komunikasi antar desa yang belum terlaksana dengan baik bersama masyarakat, belum ada lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di setiap desa, dan pandemi covid-19.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu dimana konteks dari penelitian ini adalah melihat pemberdayaan anak yang berbasis pada pendidikan nonformal di Kota Bima kemudian peneliti mengaitkan dengan Program kota Layak Anak yang sedang berjalan di Kota Bima sehingga peneliti dapat melihat perkembangan dari pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui program Kota Layak Anak. Selain itu, dalam mengukur indikator pada penelitian ini peneliti menggunakan teori ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay (*Cook and Macaulay, 1997*) yang menyatakan bahwa Masyarakat adalah subyek yang dapat menjadi agen perubahan dengan cara mencari kebebasan dari aturan yang kaku dan penuh kendali sehingga melahirkan kebebasan akan tanggung jawab terhadap ide-ide, tindakan, dan keputusan orang tersebut. Pandangan tentang pengelolaan pemberdayaan berdasarkan kerangka kerja teori ACTORS adalah Wewenang (*Authority*), Percaya diri/Kompetensi (*Confidence*), Keyakinan/Kepercayaan (*Trust*), Kesempatan (*Opportunity*), Tanggung jawab (*Responsibilities*), dan Dukungan (*Support*).

#### **1.5. Tujuan**

Pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **II. METODE**

Penelitian ini dibuat dengan metode kualitatif deskriptif sebagai suatu pendekatan ilmiah dalam mengeksplorasi masalah atau memahami gejala atau isu yang

terjadi secara umum (Creswell, 2008). Peneliti menggunakan tiga sumber dalam mengumpulkan data seperti Orang, Tempat, dan Angket. Dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi PTK PNFI, Fungsional Penyuluh Sosial DP3A, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (Terdiri dari 2 Orang), Anak Putus Sekolah yang mengikuti pendidikan nonformal (Terdiri dari 3 Orang), Anak Putus Sekolah yang tidak mengikuti pendidikan nonformal (Terdiri dari 2 Orang), dan Masyarakat (Terdiri dari 6 Orang). Dan peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data yang diperoleh di lapangan menjadi hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini.

#### **3.1. Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima**

Pemerintah Kota Bima merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengembangkan Program Kota Layak Anak. Pada tahun 2020 pemerintah daerah Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merilis Kota Layak Anak melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak. Pembentukan Kota Layak Anak di Kota Bima sendiri melibatkan berbagai pihak seperti Gugus Tugas Kota Layak Anak, Camat, Lurah, Ketua LPA, Ketua Forum Anak Kota Bima, dan unsur terkait lainnya. Program Kota Layak Anak di Kota Bima telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dalam kurung waktu 2 (dua) tahun Kota Bima yang semula meraih penghargaan madya pada tahun 2022 naik tingkat mendapatkan predikat penghargaan nindya pada tahun 2023. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak sejalan dengan pemberdayaan yang terus dilakukan dalam meminimalisir angka anak putus sekolah di Kota Bima. Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal melalui Program Kota Layak Anak ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan Teori ACTORS, dimana program ini di anggap berhasil jika memenuhi 6 (enam) indikator pada dimensi pemberdayaan, yaitu wewenang, percaya diri, keyakinan, kesempatan, tanggung jawab, dan dukungan.

##### **3.1.1 Wewenang (*Authority*)**

Wewenang pemerintah daerah Kota Bima dalam memberikan fasilitas pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Sanggar Kegiatan Belajar dituangkan pada Surat



Keputusan Walikota Nomor 641 tahun 2015. Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Sanggar Kegiatan Belajar saling bersinergi dalam rangka memberikan hak-hak pendidikan bagi anak terlebih khusus anak-anak yang putus sekolah.

**Tabel 1**  
**Hubungan instansi pemerintah berkaitan dengan pendidikan nonformal pada Program Kota Layak Anak**

No.	Instansi	Tugas
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan teknis pada pengelolaan program Kota Layak Anak.
2.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dikpora bertugas untuk menyediakan data-data dan pelayanan lainnya sesuai dengan kondisi dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dikpora.
3.	Sanggar Kegiatan Belajar	SKB bertugas dalam memberikan fasilitas pendidikan nonformal yaitu pengajaran kepada anak putus sekolah sesuai dengan arahan dari Dikpora yang berkoordinasi langsung dengan DP3A.

Sumber: Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, diolah peneliti, 2024

Berdasarkan **Tabel 1** dapat dilihat bahwa tiap instansi memiliki peran masing-masing dalam memberikan pelayanan pada bidang pendidikan nonformal melalui program Kota Layak Anak. Pemerintah Daerah di dalamnya melibatkan instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani pendidikan sehingga klaster hak sipil dan kebebasan yang befokus pada partisipasi anak serta klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya pada indikator Kota Layak Anak dapat mendukung keberhasilan dari program tersebut.

### 3.1.2 Percaya Diri/Kompetensi (*Confidence*)

Hak anak untuk berpartisipasi dapat dilihat dari pembentukan Forum Anak Kota Bima. Pembentukan Forum Anak ini di atur oleh Surat Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/345/479/VII/2022 tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kota Bima Periode Tahun 2022-2024. Forum Anak menjadi salah satu wadah bagi anak-anak untuk saling menyalurkan aspirasi sehingga tumbuh rasa kepercayaan diri untuk berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kemudian, pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya Sanggar Kegiatan Belajar selaku fasilitator pada sektor pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah terlebih khusus dalam menangani anak putus sekolah.

**Tabel 2**  
**Angka Putus Sekolah di Kota Bima**  
**Tahun Ajaran 2022/2023**

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	60
SMP	2
SMA/SMK	35
<b>Total</b>	<b>97</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023.

Berdasarkan pada **Tabel 2** Anak putus sekolah di Kota Bima pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 97 anak, angka ini terbilang cukup tinggi bagi Kota Bima. Tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan keluarga maupun sosial. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi psikologis anak serta menurunkan rasa percaya diri dalam mengembangkan potensinya. Tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yang terlanjur putus sekolah.

### **3.1.3 Keyakinan/Kepercayaan (*Trust*)**

Dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan kebijakan atau program-program pemerintah kepada masyarakat dari seluruh kalangan. sejauh ini instansi terkait telah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada anak putus sekolah. Namun upaya yang dilakukan tidak berjalan dengan optimal karena sosialisasi yang tidak tepat sasaran. Hal ini terbukti dari pernyataan masyarakat yang peneliti wawancarai dari 6 (enam) orang masyarakat hanya 2 (dua) orang yang mengetahui tentang program Kota Layak Anak. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator keyakinan/kepercayaan ini tidak dapat memenuhi dimensi pemberdayaan. Meskipun dari segi standar pelayanan sudah terencana dan dijalankan dengan baik.

### **3.1.4 Kesempatan (*Opportunity*)**

Secara garis besar, tujuan pemerintah daerah melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak agar anak memiliki kesempatan untuk turut serta dalam program perencanaan pembangunan yang didalamnya mengatur seluruh hak dan kewajiban yang anak miliki. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima kepada anak-anak di Kota Bima.



Kesempatan untuk mendapat pendidikan baik itu pendidikan formal maupun nonformal yang dapat dirasakan oleh seluruh anak di Kota Bima.

**Tabel 3**  
**Jumlah Warga Belajar dengan BOP**  
**Tahun Ajaran 2023/2024**

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Paket A	29
Paket B	27
Paket C	48
<b>Total</b>	<b>104</b>

Sumber: Sanggar Kegiatan Belajar, Tahun 2023.

Berdasarkan **Tabel 3** Warga belajar yang mendapatkan pendidikan nonformal dari seluruh jenjang sebanyak 104 anak. Dalam penanganan pemberdayaan anak indikator kesempatan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

### 3.1.5 Tanggung Jawab (*Responsibilities*)

Pada pelaksanaan teknis lapangan, Dinas Fungsional dan instansi menetapkan sebuah prosedur atau pedoman untuk menjalankan rangkaian pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah. Pemberian layanan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan adanya pedoman yang jelas terkait alur pelayanan terhadap anak putus sekolah, pembagian tanggung jawab juga menjadi jelas. hal ini dibuktikan dengan penghargaan Tingkat nindya yang diraih oleh Kota Bima setelah 3 (tiga) tahun menerapkan Kota Layak Anak.

**Tabel 4**  
**Capaian Realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2021-2023**

No.	Indikator Sasaran	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Hasil Evaluasi Kota Layak Anak (Nilai)	587	686	705

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa hasil evaluasi Kota Layak Anak di Kota Bima mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dimana Kota Bima sendiri dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut naik posisi dari pratama ke tingkat madya kemudian dari madya ke tingkat nindya. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

tentunya berpengaruh terhadap output yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Terutama pengaruh terhadap sektor pendidikan, masyarakat akan dimudahkan oleh adanya program Kota Layak Anak ini.

**Tabel 5**  
**Output Bidang Tugas Program Kota Layak Anak di Sektor Pendidikan**

No.	Klaster	Output
1.	Bidang Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	1. Sekolah Ramah Anak yaitu Sekolah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak.
		2. Forum Anak berfungsi untuk memberikan hak partisipasi bagi anak
		3. Kegiatan Kebudayaan merupakan kegiatan yang mengandung unsur kebudayaan dalam mengisi waktu luang anak.

Sumber: diolah Peneliti, Tahun 2024

Berdasarkan **Tabel 5** dapat disimpulkan bahwa output dari bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan juga komitmennya untuk memberikan hak pendidikan bagi anak-anak di Kota Bima.

### 3.1.6 Dukungan (*Support*)

Pada Program Kota Layak Anak, sarana dan prasarana disesuaikan sesuai kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kenyamanan serta keamanan bagi anak, oleh karena itu fasilitas bagi anak diberikan predikat Ramah Anak. Kemudian pendanaan pada Program Kota Layak Anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima dan sumber lainnya yang sah. Pendanaan Program ini disesuaikan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak.

**Tabel 6**  
**Anggaran Pengeluaran Program Kota Layak Anak, Tahun 2023**

Keterangan	Jumlah	Anggaran
Lembaga dengan fasilitas ramah anak	23	Rp. 186.338.500
PKM dan Sekolah Ramah Anak	43	Rp. 73.822.700
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>Rp. 260.161.200</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2023.



Berdasarkan **Tabel 6** Bahwa dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam menyelenggarakan Program Kota Layak Anak. Anggaran yang besar dibutuhkan untuk mendukung pembangunan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi anak.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak**

#### **3.2.1 Faktor Pendukung**

Program Kota Layak Anak di Kota Bima merupakan program pemerintah yang lahir dari berbagai macam kondisi dan peristiwa yang terjadi pada anak masa kini. Salah satunya permasalahan terkait anak putus sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor permasalahan, sehingga pemerintah dituntut mampu dalam memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak tersebut. Pada tahun 2021 Kota Bima secara resmi menjalankan Program Kota Layak Anak dan dalam pelaksanaan kebijakan Program Kota Layak Anak ini perlu diketahui faktor-faktor pendukung sehingga program dapat berjalan dengan baik. Dengan mengetahui faktor-faktor pendukung maka program dapat terlaksana dengan optimal sesuai rencana. Pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Bima memiliki beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya program dan hal ini dijelaskan ke dalam dimensi pemberdayaan. Menurut *Cook and Macaulay* (1997) terdapat 6 (Enam) indikator yang menjadi tolak ukur untuk mengukur keberhasilan dari sebuah pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada masyarakat itu sendiri sebagai subyek pemberdayaan dan pemerintah maupun swasta sebagai aktor dari pemberdayaan. Di antara 6 (enam) indikator terdapat 4 indikator yang menjadi faktor pendukung dalam memenuhi dimensi pemberdayaan, yaitu indikator Wewenang (*Authority*), Kesempatan (*Opportunity*), Tanggung Jawab (*Responsibilities*), Dukungan (*Support*). Selain 4 (empat) faktor pendukung di atas, peneliti menemukan faktor lainnya yang turut mendukung proses Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Berbasis Pendidikan Nonformal melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima. Faktor lainnya adalah Konsistensi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan Program Kota Layak Anak, Insentif yang didapatkan oleh gugus tugas Kota Layak Anak yang termasuk kepada anggaran pengeluaran Program Kota Layak Anak, dan Fragmentasi yang jelas artinya pembagian tugas yang jelas antara Dinas Fungsional sehingga Program Kota Layak Anak optimal berjalan.

#### **3.2.1 Faktor Penghambat**

Pelaksanaan sebuah program tentu saja tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, karena kerap kali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang turut mempengaruhi pelaksanaan program sehingga tidak dapat dijalankan secara optimal. Dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kota Bima telah ditemukan beberapa hambatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang bertentangan dengan pelaksanaan Program Kota Layak Anak. Hambatan-hambatan tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bima, sehingga hak anak dalam menempuh

pendidikan terlebih khusus pada anak putus sekolah terbuka dengan lebar. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan masalah terkait hambatan-hambatan agar pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang terdapat pada pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima sendiri termasuk kedalam indikator Percaya Diri/Kompetensi (*Confidence*) dan Keyakinan/Kepercayaan (*Trust*). Selain faktor percaya diri dan keyakinan, terdapat faktor lain yang turut menghambat jalannya Program Pemberdayaan Anak ini. Faktor tersebut adalah komunikasi. Komunikasi yang belum terlaksana antara pemerintah dan masyarakat turut menjadi penghambat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

### **3.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak**

Setiap daerah tentu saja memiliki beragam permasalahan yang berkaitan antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Permasalahan ini tentu saja harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah selaku perangkat daerah memiliki tugas untuk menjalankan, mengatur serta menyelenggarakan kebijakan di daerah tersebut, tidak terkecuali pada pelaksanaan Program Kota Layak Anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi ditemukan beberapa permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus sigap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak menjadi rumit dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Jika permasalahan segera diatasi maka besar kemungkinan kebijakan akan berjalan secara optimal dan kendala terjadi dapat diminimalisir. Beberapa permasalahan yang terjadi dapat diatasi pada pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui kota layak anak di kota bima adalah dengan cara melakukan Sosialisasi Secara Berkala Kepada Masyarakat, Pemberian Konseling Pada Anak Putus Sekolah, dan Melibatkan Orangtua dalam Proses Pendidikan Anak Putus Sekolah.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui kota layak anak di Kota Bima memiliki sisi positif dalam membangun pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah. Sanggar Kegiatan Belajar merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban dalam memberikan pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah. Peneliti menemukan temuan penting bahwa pelaksanaan pemberdayaan anak ini mencakup aspek-aspek penting yang mendukung jalannya pendidikan nonformal seperti kebijakan yang matang, dinas/lembaga yang terlibat, hingga keikutsertaan masyarakat. Sama halnya dengan penelitian oleh Andi Ismail Lukman (2021) berfokus pada pendidikan nonformal bagi anak – anak dalam rangka pemberdayaan anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa



pelaksanaan pemberdayaan anak melalui Pendidikan nonformal pada PKBM Tiara Dezy mencakup 3 tahapan yang menjadi patokan dalam terpenuhinya pemberdayaan anak pada bidang nonformal. Layaknya penelitian lainnya, pada penelitian ini terdapat temuan yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan pemberdayaan anak berbasis pendidikan nonformal melalui program kota layak anak di Kota Bima. Kekurangan yang utama berasal dari segi perekonomian. Kemiskinan yang melanda masyarakat menjadikan sebagian anak menjadi putus sekolah dengan alasan membantu orangtua bekerja, menikah dini, ataupun alasan lainnya. Kurangnya wawasan masyarakat serta sosialisasi yang tidak tepat sasaran sehingga Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi salahsatu kekurangan pada penelitian ini. Sama halnya dengan penelitian oleh Supsiliani (2019) dan Nistiarisa Agelina (2013) bahwa maksud dari pemberdayaan adalah agar masyarakat memiliki kesadaran akan pembangunan bidang pendidikan nonformal serta Beberapa permasalahan yang timbul seperti, lemahnya keutuhan keluarga, masyarakat yang kurang memahami penanganan terhadap anak, perspektif *stakeholder* tentang hak anak bagi para anak.

#### IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima secara teknis pelaksanaannya sudah optimal. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya 4 (empat) indikator pada dimensi pemberdayaan, yaitu Indikator Wewenang/*Authority*, Kesempatan/*Opportunity*, Tanggung jawab/*Responsibilities*, dan Dukungan/*Support*. Beberapa faktor yang mendukung Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima adalah indikator wewenang, kesempatan, tanggung jawab dan dukungan. Kemudian, terdapat indikator lainnya yang membuktikan bahwa pelaksanaan pemberdayaan telah terpenuhi seperti Konsistensi, Insentif, dan Fragmentasi.. Sedangkan Faktor yang menghambat pelaksanaan Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima adalah indikator Percaya diri dan Keyakinan. Dan indikator Komunikasi menjadi faktor penghambat lain dalam terwujudnya Program Pemberdayaan Anak. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani Pemberdayaan Anak Berbasis Pendidikan Nonformal Melalui Program Kota Layak Anak di Kota Bima adalah dengan cara sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, pemberian konseling bagi anak putus sekolah, dan melibatkan orangtua pada pendidikan anak putus sekolah.

**Keterbatasan Penelitian** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada lingkup pendidikan nonformal yang dinilai dari pelaksanaan Program Kota Layak Anak.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini hanya membahas tentang sektor pendidikan nonformal pada Program kota Layak Anak, oleh karena itu peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti

23 indikator lain yang berkaitan dengan Program Kota Layak Anak. Karena masih banyak karya ilmiah yang belum berkaitan langsung dengan 23 indikator Kota Layak Anak

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan Sanggar Kegiatan Belajar yang sudah memberikan kontribusi kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini. Kepada Ibu Intansari, M.Pd Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sekaligus mentor langsung di lapangan yang telah memberikan masukan-masukan yang mendukung pada penelitian ini. Dan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan masukan positif selama Menyusun penelitian ini. Dan kepada seluruh pihak yang berkontribusi memberikan masukan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (T. S. Razak (1.)). De La Macca
- Kementerian, & Indonesia, P. P. D. P. A. R. (2016). Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Pedoman PATBM KP3A*, 0–106.
- Laeni, N. A. (2023). Pengembangan Media Smart Maze Untuk Memfasilitasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 180–190.
- Maani, D. K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Demokrasi*, 53–66.
- Macaulay, S. C., & Cook, S. (1997). Perfect Empewermant. *PT Elex Media Komputindo*.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Novita Sari, Ifit. Puji Lestari, Lilla. Wijaya Kusuma, Dedy. Mafulah, Siti. Puji Nali, Diah. Karwanto. Supriyono, Dian, Jauhara. Widiatsih, Asri. Setiyo, Edy. Maghfur,



- Ifdlolul. Sari, Marinda. dan Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Hayat (ed.)). Unisma Press.
- Prihantika, I., Atika, D. B., Puspawati, A. A., & Sulistiowati, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pekon Mataram Menuju Desa Layak Anak. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(1), 41–49.
- Semiawan R Conny. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Supsiloani. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5(1), 20–30.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Tjandraningsih, I., Sasmito, W., Munthe, R., Sp, O., Simandjuntak, A., Tigor, A., Junaidi, C., Putra, N., Whitmore, S., & Sudrajat, T. (1996). *Dehumanisasi anak marjinal: berbagai pengalaman pemberdayaan*. AKATIGA.
- Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Perda Kota Bima Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- INDONESIA, U. (2022). *Laporan Tahunan Indonesia 2022*.
- UNICEF. (2022). *Many children lack foundational reading and numeracy skills, and drastic disparities are observed both within and between countries*. <https://data.unicef.org/topic/education/learning-and-skills/>